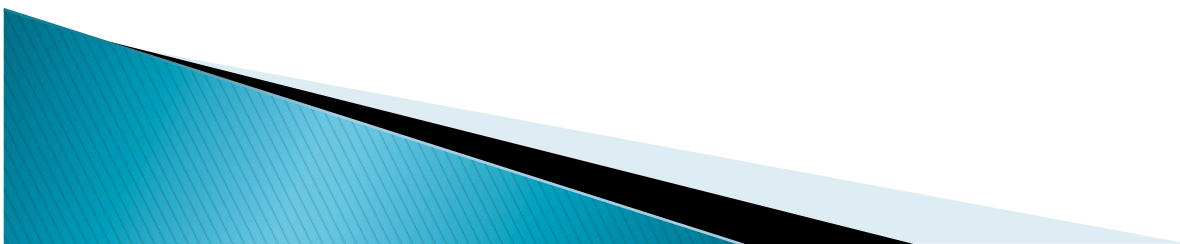


# Penyusunan APBD dan Fungsi Penganggaran DPRD

Lokakarya DPRD Kabupaten Malang  
Hotel Mutiara, Jogja, 2 Juli 2011

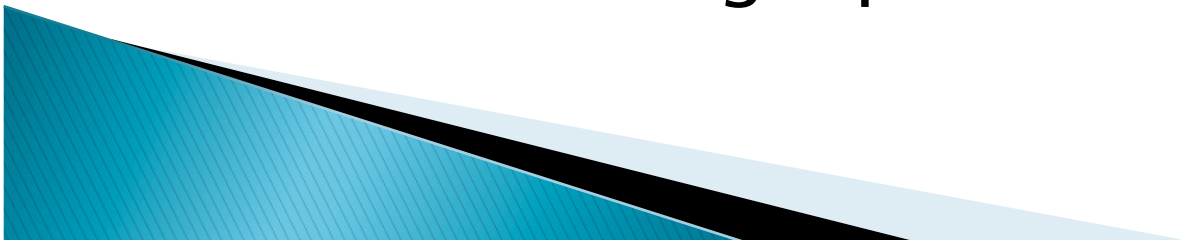
Dr. Wahyudi Kumorotomo  
Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)  
kumoro@map.ugm.ac.id



# Alat Kelengkapan DPRD

(ps.353 ayat 1, UU No.27/2009)

1. Pimpinan
  2. Badan Musyawarah (Bamus)
  3. Komisi
  4. Badan Legislasi Daerah
  5. Badan Anggaran (Panitia Anggaran / Panggar)
  6. Badan Kehormatan
  7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- 

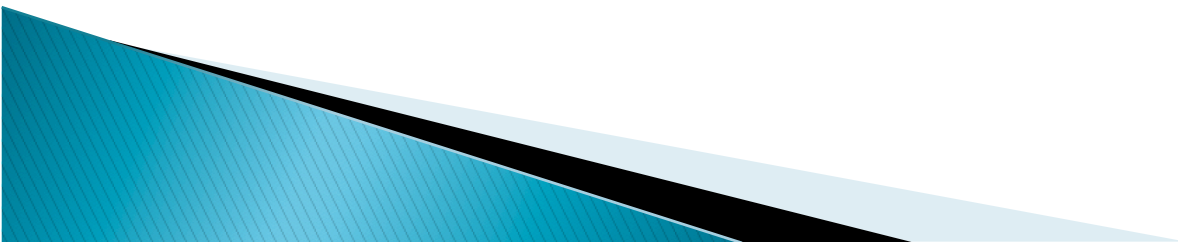
# **DPRD Sebagai Lembaga Pengawas**

**INSTITUSI DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah yg memiliki fungsi Pembuatan Kebijakan Publik (Legislasi dan Kebijakan Anggaran) dan Pengawasan jalannya pemerintahan daerah.**

**UU NO. 32 THN 2004 PASAL 19 : DPRD TERMASUK DLM PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH BERSAMA DGN BUPATI. INI BERBEDA DGN PUSAT, YAKNI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN HANYA PRESIDEN/WAPRES DAN PARA MENTERI, dan DPRRI tidak masuk sbg Penyelenggara Pemerintahan)**

**Di sinilah diskusi tentang :**

- a. Apakah anggt DPRD itu Pejabat negara atau bukan? Bukan.**
- b. Apakah di daerah relevan adanya “Oposisi” ataukah sbg “Mitra Kritis”?**
- c. Posisi Politik Fraksi-Fraksi, “Political Standing”, sangat mewarnai corak hubungannya dgn Eksekutif. Hubungan Panas atau dingin.**



# Pengawasan vs Pemeriksaan



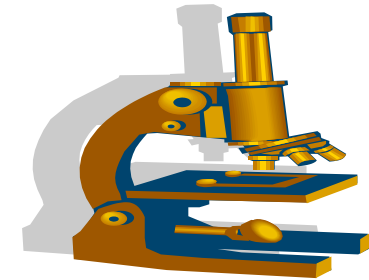
## Pengawasan/Pengendalian

Unsur yang dibentuk untuk memastikan bahwa sasaran & tujuan organisasi dr sistem operasi yang dibentuk agar dapat tercapai (Lawrence B. Sawyer)



### Unsur Pengendalian

- Perencanaan
- Prosedur
- Ketentuan
- Pencatatan
- Organisasi
- Pelaporan
- SDM handal & kompeten
- Kontrol Internal
- Kegiatan pengawasan.



## Pemeriksaan

Suatu proses yg terorganisir yg dilakukan o/ seseorang yg kompeten & independent dlm mengumpulkan & meng evaluasi bukti berkaitan informasi terhitung (keuangan) dr suatu entitas ekonomi ttt u/ menentukan & melaporkan tingkat kesesuaian dgn kriteria.



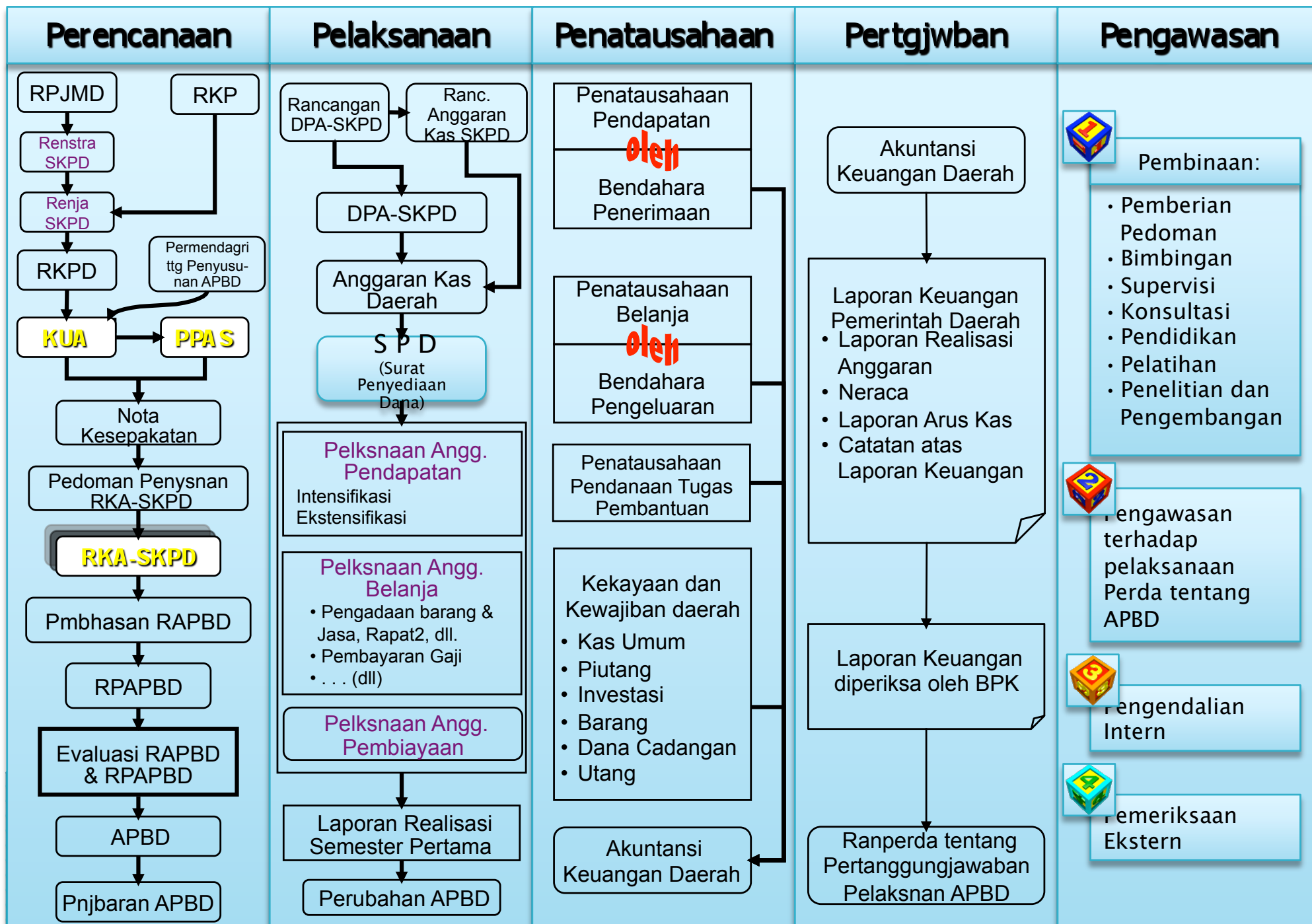
- Unsur Pemeriksaan
- SDM kompeten & independent
- Auditee (entitas ekonomi)
- Bukti-bukti informasi terhitung
- Kriteria yg berlaku (establ. Criteria)
- Proses pengumpulan & evaluasi dokumen (audit technic & process)
- Proses laporan (opini, saran & rekom).

# Apa yang harus diawasi dalam proses APBD?

## Tiga tahapan proses:

1. **Proses Birokratik dan Teknokratik**
  2. **Proses Partisipatif**
  3. **Proses Politik.**
- 

# Tabel 1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



**Tabel 2. Jadwal Penyusunan APBD**

NO	URAIAN	WAKTU	KET
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH	Minggu I bulan Juni	1 bulan
3.	Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD	Pertengahan bulan Juni	3 minggu
4.	KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD	Akhir bulan Juli	
5.	SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD	Awal bulan Agustus	1 minggu
6.	Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD	Mg I Agustus s/d Mg I Oktober	2 1/2 bulan
7.	Penyampaian RAPBD kpd DPRD	Minggu pertama bulan Oktober	2 bulan
8.	Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH)	Paling lama 1 (satu) bulan sebelum th anggaran ybs (November)	
9.	Hasil evaluasi RAPBD	15 hari kerja (Desember)	
10.	Penetapan Perda APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dg hasil evaluasi	Akhir Desember (31 Desember)	

Tabel 3. Realisasi APBD Kab Malang Tahun 2010

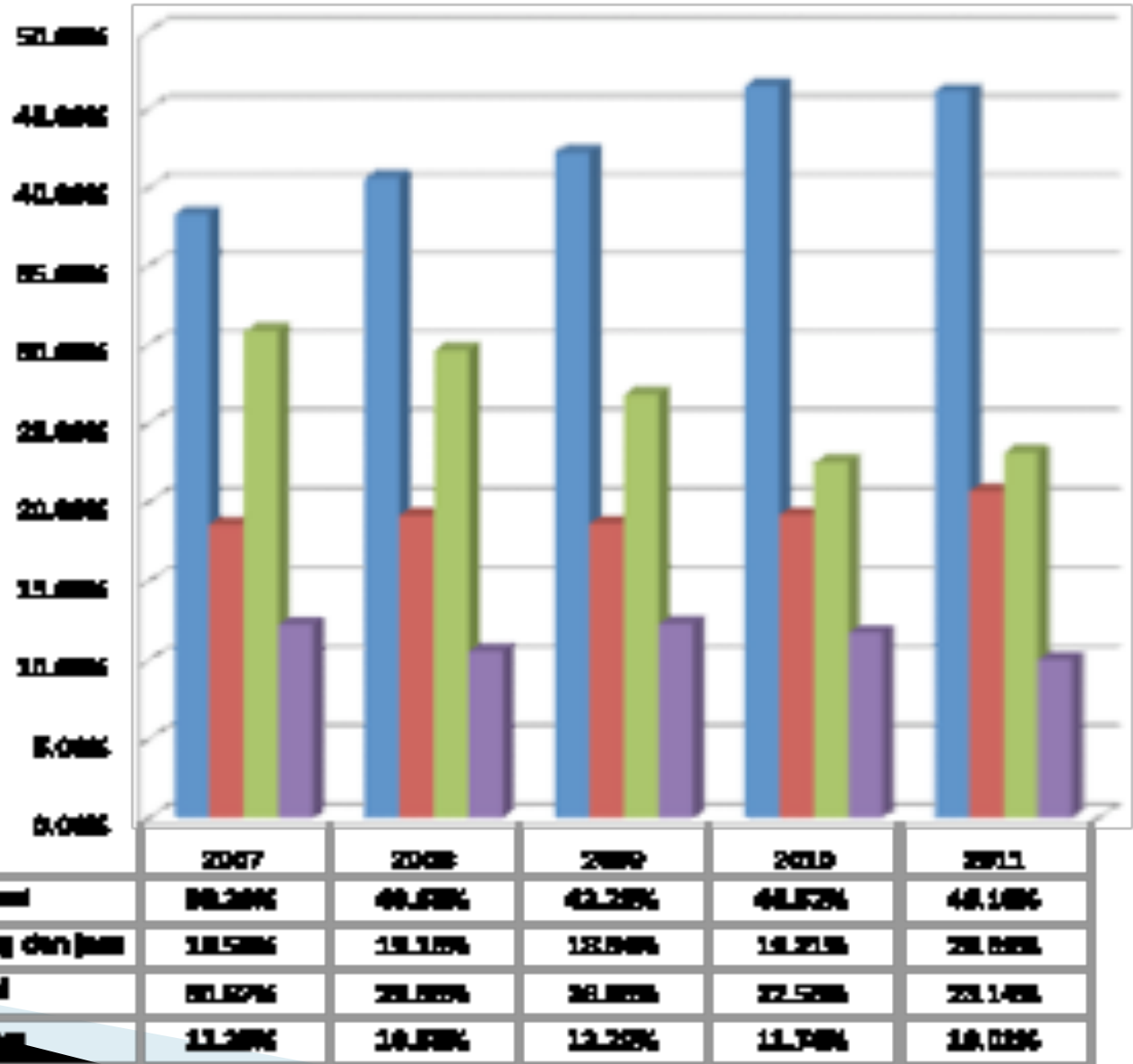
Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
<b>Total Pendapatan</b>		<b>1.425.050</b>	
	Pendapatan Asli Daerah	124.389	7,9
	Dana Perimbangan	1.157.118	73,59
	Lain-lain Pendapatan	54.144	
<b>Total Belanja</b>		<b>1.572.407</b>	<b>100</b>
Belanja Tidak Langsung		1.128.811	71,79
	Belanja pegawai	820.644	52,19
	Hibah	128.071	
	Bantuan sosial	69.848	
	Bagi hasil	11.066	
	Bantuan keuangan	96.532	
	Belanja tidak terduga	2.500	
Belanja Langsung		443.595	28,21
	Belanja pegawai	56.925	
	Belanja barang & jasa	190.087	
	Belanja modal	196.584	12,5
Pembiayaan Daerah		134.530	
	SiLPA	134.530	8,5
<b>Defisit</b>		<b>147.356</b>	<b>9,37</b>



# Trend Komposisi Belanja Daerah


Note: data APBD konsolidasi secara nasional

- ▶ Belanja pegawai selalu dominan dibanding jenis belanja lainnya. Pada tahun 2011, porsi belanja pegawai (46,16%) turun sedikit dibanding tahun 2010 .
- ▶ Belanja modal mengalami trend menurun selama 2007-2011. Pada tahun 2011, porsi belanja modal terhadap total belanja dlm APBD hanya mencapai 20,7%.



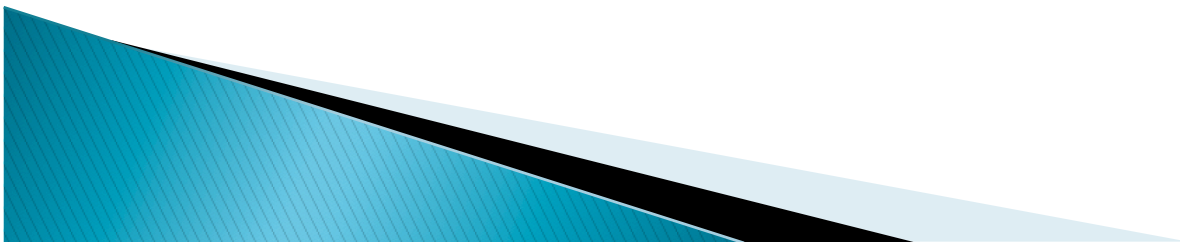
Belanja Pegawai	40.20%	40.50%	42.20%	46.50%	46.16%
Belanja Barang dan Jasa	18.50%	19.10%	18.90%	19.30%	20.80%
Belanja Modal	21.50%	21.00%	20.00%	22.50%	20.14%
Belanja Lain-lain	11.20%	10.50%	12.20%	11.70%	10.00%

## **MASALAH-MASALAH KRUSIAL DALAM PEMBAHASAN RAPBD DAN LKPJ**

- 1. KONSISTENSI ANTARA PROGRAM MAUPUN KEGIATAN YG ADA DLM RAPBD DGN KUA YG DISEPAKATI DPRD DAN EKSEKUTIF.  
# Kebijakan Umum APBD berisi Prioritas Program dan Patokan-Patokan sebagai Pagu Sementara penggunaan dana dlm APBD krn memang blm detail. Dlm LKPJ dpt dicek jangan sampai kegiatan diubah bentuk maupun anggarannya.**
  - 2. SASARAN CAPAIAN PROGRAM HARUS TERJABARKAN DLM 'KEGIATAN-KEGIATAN' SHG JELAS BHW SELURUH KEGIATAN ITU MENUJU PD SATU SASARAN YG TLH DITETAPKAN (KUA).  
# Sering terjadi tidak sambung antara "NAMA PROGRAM" dgn "KEGIATAN-KEGIATAN" Penjabarannya, yakni dgn mengecek "input"/masukan dana/SDM, "output"/keluaran wujud kegiatan dan "outcome"/hasil. LKPJ melihat capaian kinerjanya.**
- 

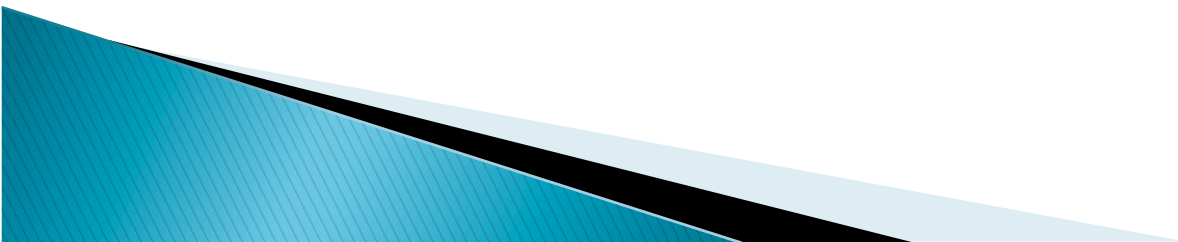
Lanjutan.....

3. **PENGANGGARAN DANA BANTUAN SOSIAL HARUS ADA PENJABARANNYA MINIMAL SCR GARIS BESARNYA.**  
# Tugas Panitia Anggaran untuk menanyakan hal ini pd eksekutif. LKPJ harus melampirkan sasaran dan alokasi dana bantuan sosial kpd masyarakat sehingga tidak ada perulangan tiap tahun ataupun dominasi oleh kelompok tertentu.
  
4. **KETAATAN PADA PENGGUNAAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA YG TELAH DITETAPKAN OLEH BUPATI.**  
# Selain melebihi jumlah kebutuhan alat-alat tulis kantor seperti Flash Disk, kertas, fotocopy, biaya cetak dll, biasanya beberapa SKPD jg menggunakan harga yg berbeda-beda untuk satu jenis barangnya. LKPJ dapat dipakai sbg ukuran keseriusan dlm efisiensi anggaran.



- 5. Pastikan bahwa anggaran yg berdampak langsung kpd masyarakat memperoleh porsi yg memadai dlm APBD seperti anggaran untuk pendidikan, pertanian, UMKM, pengamanan sumber air masy., kesehatan dan infra struktur lebih besar drpd belanja pegawai.**

**# Pemerintahan yg sukses dimata rakyat sangat sederhana kriterianya, yakni apabila dpt meningkatkan kesejahteraan mereka. Sejahtera bagi rakyat jg sangat sederhana ukurannya yakni hanya 3 sj : Otak Pintar, Badan Sehat dan Kantong Tebal. Yg lainnya akan dilupakan. LKPJ sebagai sarana untuk mengecek apakah eksekutif telah mencapai target kinerja secara keseluruhan atau belum, sbg bahan untuk evaluasi dan peningkatan kinerja di masa depan.**



Kedudukan sebagai Wakil Rakyat adalah amanah.

Inilah saatnya untuk mengabdikan kepada rakyat Kabupaten Malang dengan menciptakan APBD yang pro-rakyat.

**TERIMA KASIH**

